

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkait dengan adanya kepentingan manajemen dalam melaporkan hasil kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka dibutuhkan laporan yang berkualitas. Pada dasarnya akan timbul kesenjangan informasi yang disediakan dikarenakan muncul perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan (Al-Thuneibat *et al.*, 2011).

Dalam rangka menjamin laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat dipercaya oleh pengguna, biasanya diperlukan pernyataan dari seorang auditor dimana auditor merupakan pihak ketiga yang objektif dan tepat yang melakukan pemeriksaan independen yang memberikan kredibilitas pernyataan laporan keuangan pada pengguna (Enofe *et al.*, 2013).

Menurut Mulyadi dan Puradireja (1998) dalam (Monica, 2015), berdasarkan hasil audit laporan keuangan suatu entitas, maka auditor akan menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini, peran auditor sangat penting untuk memeriksa laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan dimana laporan keuangan yang

diperiksa harus bebas dari hal yang material dan sesuai PABU (Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum).

Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit sebagai sebuah kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material. Proses pelaporan yang dilakukan oleh auditor tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Menurut Arens *et al.* (2008), auditor menerima *fee* dari manajemen perusahaan dalam melakukan audit. Hal itu berarti, auditor bekerja atas permintaan manajemen. Menurut Novitasari (2004) dalam Monica (2015), dalam melaksanakan proses audit, auditor dan manajemen akan melakukan suatu perikatan. Auditor harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit sesuai dengan standar yang berlaku guna memenuhi kepentingan pihak ketiga. Dalam hal ini, independensi harus tetap dimiliki setiap akuntan publik sesuai dengan aturan standar umum *auditing* kedua, bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan auditor (Agoes, 2012, 33).

Masalah independensi pernah menjadi alasan runtuhnya Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson pada tahun 2001. Hal ini disebabkan Anderson melakukan *fraud* etika audit maupun hukum, yaitu *window dressing* dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang sangat bertentangan dengan kondisi internal perusahaan Enron. Hubungan kerjasama antara Anderson dan Enron sudah terjalin sejak tahun 1985. Masa perikatan yang lama tersebut

menyebabkan berkurangnya independensi KAP Anderson. Skandal tersebut memicu munculnya regulasi *Sarbanes Oxley Act* (SOX) di Amerika Serikat tahun 2002 guna meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap kualitas audit.

Di Indonesia pun terjadi kasus manipulasi laporan keuangan pada PT. KAI tahun 2005 yang melibatkan KAP “S. Mannan, Sofwan, Adnan dan Rekan”. Diumumkan bahwa PT. KAI mendapat keuntungan sebanyak Rp6,9 milyar padahal sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp63 milyar dan terjadi penyajian yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yakni terkait piutang PPN, persediaan, uang muka gaji, penyertaan modal, dll, namun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi oleh auditor. Akuntan publik diduga terlibat dengan pihak-pihak ketiga yang ingin mencari keuntungan. Kasus tersebut menyebabkan pembekuan izin selama 10 bulan terhadap Akuntan Publik Drs. S. Mannan, yang merupakan pemimpin rekan pada KAP S. Mannan, Sofwan, Adnan dan Rekan, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2007 tanggal 6 Juli 2007 (Mahmudah, 2009). Kasus-kasus tersebut menyalahi Standar Profesi Akuntan Publik dalam standar umum kedua (SA 220) yang berbunyi “Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”.

Kasus-kasus yang telah terungkap tersebut juga berdampak dengan dirubahnya KMK Nomor 423/KMK.06/2002 menjadi PMK Nomor 17/PMK.01/2008. Di dalam Pasal 3 ayat (1) dalam peraturan baru tersebut diatur mengenai *tenure* dan rotasi audit, yaitu pemberian jasa audit umum atas

laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit di Indonesia dengan mempertahankan independensi auditor.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik sendiri merupakan kantor yang menyediakan jasa audit atas laporan keuangan ataupun sebagai kantor untuk jasa konsultasi. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu *first tier*, *second tier* dan *third tier* dilihat dari sumber daya yang dimiliki KAP tersebut.

Dalam hal ini, KAP besar (*The Big 4*) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas dibanding dengan KAP kecil (*Non-Big 4*). KAP *Big Four* memiliki profitabilitas tinggi, *professional staff* yang banyak dan pengalaman yang mentereng dalam melakukan audit perusahaan-perusahaan besar termasuk di Indonesia (Christiawan dan Budisantosa, 2014). Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien (Panjaitan, 2014).

Auditor dalam mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas audit. KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* dianggap memiliki

kualitas audit dalam hal pemberian opini yang lebih baik dibanding KAP *Non-Big Four*. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila KAP *Non-Big Four* tersebut memiliki kualitas audit yang baik karena semua KAP mengacu pada standar yang sama dalam melaksanakan audit yang tentunya dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar tersebut.

Alasan lainnya, KAP *Big Four* dianggap lebih tinggi karena mempunyai pengalaman yang lebih banyak karena mempunyai jumlah dan ragam klien yang lebih banyak. Cakupan geografis yang dimiliki juga lebih luas dibandingkan dengan KAP kecil (yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big 4*) sehingga bisa menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Panjaitan, 2014).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, Al-Thuneibat *et al.* (2011) menyimpulkan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Dari penelitian tersebut dapat menjelaskan bahwa masa perikatan yang lama dan rotasi audit yang lemah dapat membuat kualitas audit yang lemah pula karena berkurangnya independensi dari audit itu sendiri. Dari hasil itu dibutuhkan pembatasan masa perikatan dan rotasi audit guna meningkatkan kualitas audit.

Jackson *et al.* (2008) mencoba meneliti bagaimana pengaruh rotasi perusahaan KAP (dalam kaitannya dengan hubungan auditor–klien) terhadap kualitas audit. Dengan menggunakan *proxy* opini *going concern* memperoleh hasil bahwa pendekatan kebijaksanaan akrual, mereka menyimpulkan bahwa rotasi audit berpengaruh dengan arah yang positif terhadap kualitas audit. Hasil

penelitian tersebut juga sesuai dengan penelitian Sinaga (2012) dengan tambahan ukuran KAP dengan hasil berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sedangkan dengan menggunakan pendekatan kebijaksanaan akrual, penelitian Jackson *et al.* (2008) dengan menggunakan pendekatan kebijaksanaan akrual memperoleh hasil bahwa hubungan auditor-klien memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan temuan tersebut mereka menyimpulkan bahwa rotasi KAP tidak akan meningkatkan kualitas audit dan berpendapat bahwa rotasi KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien hanya akan memunculkan biaya-biaya yang tidak penting, baik bagi kantor akuntan maupun bagi perusahaan dengan manfaat yang minimal. Hal ini dapat disimpulkan audit rotasi tidak mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian ini mengukur pengaruh *audit tenure*, rotasi audit dan ukuran KAP terhadap kualitas audit dengan menggunakan *proxy* opini *going concern* terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih adanya hasil yang berbeda dari pengujian tersebut. Hal ini dikarenakan pada penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan pada tempat yang berbeda yang tentunya memiliki perbedaan dalam regulasi di masing-masing negara. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh *Audit Tenure*, Rotasi Audit dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit”.

B. Rumusan Masalah

Beberapa riset di berbagai negara telah membuktikan adanya pengaruh dari *tenure* audit, rotasi audit serta ukuran KAP terhadap kualitas audit (lihat misalnya Kurniasih (2014), Al-Thuneibat *et al.* (2011), Mgbame *et al.* (2012), Febriyanti dan Mertha (2014), Francis dan Yu (2009)).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya dan variasi hasil yang diberikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkup yang berbeda, maka rumusan masalah yang diambil dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *audit tenure*, rotasi audit dan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 dengan fokus penelitian tahun 2011-2014.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh:

1. *Audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Rotasi Audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
4. *Audit tenure*, rotasi audit dan ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak, baik pemegang saham, (calon) *investor*, *regulator*, manajer, maupun pihak akademisi, yaitu:

1. Sebagai tambahan bagi literatur akuntansi mengenai pengaruh *audit tenure*, rotasi audit dan ukuran KAP terhadap kualitas audit.
2. Sebagai referensi untuk menilai kinerja perusahaan yang dilihat dari pengaruh segi *audit tenure*, rotasi audit dan ukuran KAP terhadap kualitas audit yakni penerimaan opini *going concern*.